

Kebijakan Pengembangan Wilayah Berbasis Pembangunan Yang Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara

Kariaman Sinaga
Universitas Dharmawangsa
Email: kariamansinaga@dharmawangsa.aac.id

Ringkasan - Kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara menghadapi berbagai tantangan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan maka kebijakan pengembangan wilayah tidak terlepas dari aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek sumber daya manusia, dan aspek hukum. Kebijakan pengembangan pengembangan wilayah yang dilakukan merupakan sinkronisasi dari visi pembangunan nasional serta regulasi pembangunan berkelanjutan pada level global yang dilakukan melalui kesepakatan yang dilakukan berbagai lembaga internasional. Tantangan pembangunan berkelanjutan dalam konteks pembangunan di Provinsi Sumatera Utara mengalami berbagai hambatan karena kurangnya partisipasi dari kelompok atau lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kearifan lokal sesuai dengan adat istiadat suatu wilayah. Hambatan secara ekonomi menunjukkan masih tingginya ketimpangan sosial, penegakan hukum yang masih rendah, serta kesiapan sumber daya manusia yang dapat dilihat berdasarkan jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara sebesar lima puluh persen merupakan lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Terdapat lima permasalahan utama yang perlu ditingkatkan untuk dapat mendukung kebijakan pengembangan wilayah yaitu: aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, aspek sumber daya manusia, dan aspek hukum.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengembangan Wilayah, dan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kajian kebijakan pengembangan wilayah di setiap wilayah di Indonesia tetap menjadi bagian luas yang harus diimplementasikan dalam berbagai bidang yang harus memiliki sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional serta konsep pembangunan global yakni pembangunan yang berkelanjutan. Konsep kebijakan pengembangan wilayah yang dilakukan selama ini masih mengalami pembusukan yang ditunjukkan pada tahapan kebijakan pengembangan wilayah yang tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Esensi kesejarahan sejak negara Indonesia merdeka maupun sebelum merdeka telah menunjukkan

berbagai dinamika yang hingga saat ini masih menunjukkan tingginya kemiskinan, tingginya pengangguran serta permasalahan kronis lainnya sehingga masih jauh dari pencapaian tujuan nasional yaitu kehidupan yang mensejahterakan masyarakat serta kecerdasan masyarakat Indonesia.

Untuk melihat konteks wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera dapat dilihat berdasarkan wilayah kabupaten dan kota. Wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari kabupaten dan kota meliputi:

1. Wilayah yang berada di dataran tinggi terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu: a.Kabupaten Tapanuli Utara, b.Kabupaten Toba, c.Kabupaten Samosir, d.Kabupaten Simalungun, e.Kabupaten Dairi, f.Kabupaten Pakpak Bharat, g.Kabupaten Humbang Hasundutan, h.Kabupaten Karo, dan i.Kota Pematang Siantar.
2. Wilayah yang berada di Pantai Timur yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 4 (empat) kota meliputi: a.Kabupaten Labuhan Batu, b.Kabupaten Labuhan Batu Selatan, c.Kabupaten Labuhan Batu Utara, d.Kabupaten Asahan, e.Kabupaten Batu Bara, f.Kabupaten Deli Serdang, g.Kabupaten Langkat, h.Kabupaten Langkat, i.Kota Tanjung Balai, j.Kota Tebing Tinggi, l.Kota Medan, dan l.Kota Binjai.
3. Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang berada di dataran tinggi terdiri dari 8 (delapan) kabupaten yang terdiri dari: a.Kabupaten Tapanuli Utara, b.Kabupaten Toba, c.Kabupaten Samosir, d.Kabupaten Dairi, e.Kabupaten Simalungun, f.Kabupaten Pakpak Bharat, g.Kabupaten Humbang Hasundutan, dan h.Kabupaten Karo, kemudian 1 (satu) kota yaitu: Kota Pematang Siantar.
4. Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang berada di Pantai Timur terdiri dari 8 (delapan) kabupaten yang terdiri dari: a. Kabupaten Labuhan Batu, b.Kabupaten Labuhan Batu Utara, c.Labuhan Batu Selatan, d.Kabupaten Asahan, e.Kabupaten Batubara, f.Kabupaten Deli Serdang, g.Kabupaten Langkat, dan h.Kabupaten Serdang Bedagai.

Sedangkan kota di Pantai Timur terdiri dari: a.Kota Tanjung Balai, b.Kota Tebing Tinggi, c.Kota Medan, dan d.Kota Binjai.

Pembahasan tentang kebijakan pengembangan wilayah yang dilakukan pada beberapa pembahasan akan melihat bentuk pengembangan pada sektor pariwisata sebagai salah satu potensi yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara. Demikian pula perbandingan pembahasan yang dipergunakan juga mengambil berbagai bentuk pengembangan wilayah yang sesuai dengan konteks pengembangan suatu wilayah atau melalui melalui literature terkait dengan kebijakan pengembangan suatu wilayah. Pembahasan juga tidak terlepas dari konsep kebijakan publik sebagai implementasi dari suatu kebijakan pengembangan wilayah yang menyangkut pada kepentingan masyarakat luas.

METODE

Metode penulisan yang digunakan dilakukan dengan menggambarkan dan mendeskripsikan melalui berbagai literature dan melakukan analisis berdasarkan keterkaitan masalah dengan berbagai hal yang terkait untuk memperjelas dan menunjukkan keterkaitannya dengan berbagai teori-teori kebijakan publik. Pembahasan yang dilakukan melihat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kebijakan pengembangan wilayah yang dilihat berdasarkan pada teori-teori kebijakan publik sebagai bagian dari konsep keilmuan administrasi publik.

PEMBAHASAN

Kebijakan pengembangan wilayah memiliki kompleksitas sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi suatu wilayah. Kesesuaian terhadap suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki yang sejalan dengan konsep pelaksanaan otonomi daerah. Kesesuaian yang dilakukan merupakan solusi dalam memajukan suatu wilayah yang termasuk dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.(Hariyanto & Tukidi, 2007). Pengembangan wilayah yang dimaksud meliputi

3 (tiga) proses tahapan yang harus ditempuh meliputi: a. Proses perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) sebagai “guidance of future action” dalam pengembangan suatu wilayah, b. Proses pemanfaatan ruang, dan c. proses pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui evaluasi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Berdasarkan perbedaan atau keragaman wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara jelas memerlukan perencanaan yang berbeda sesuai dengan potensi yang dapat dilakukan peningkatan pengembangan wilayah. Tahapan kebijakan yang diperlukan pada saat ini semakin menunjukkan perlunya penguatan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan berkontribusi dalam tahapan-tahapan kebijakan publik. Engan kata lain kebijakan pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam mengawal tahapan-tahapan kebijakan. (Yulyana, 2019)

Dalam kaitannya dengan kebijakan pengembangan wilayah memiliki ketrkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat pada suatu wilayah. Aspek-aspek yang dimaksud dalam pengembangan wilayah meliputi aspek politik, aspek ekonomi, aspek social, dan aspek budaya. Hal ini memiliki keterkaitan dikarenakan masing-masing aspek kehidupan masyarakat memberikan andil atau pengaruh yang akan menunjukkan kepercayaan atau dukungan dari masyarakat untuk menerima dan menjalankan program yang dijalankan oleh pemerintah. Sebagai analogi bahwa pemerintahan Kota Medan yang dilakukan pada tahun 2019 yang menunjukkan lebih dari 50 % warga Kota Medan yang tidak ikut dalam proses pemilihan maka pada program-program yang dijalankan pasca terpilihnya walikota melalui hasil pemilihan yang tidak maksimal akan mengurangi kepercayaan dan dukungan dan program yang dijalankan pemerintah yang berkuasa atau yang memerintah. (Ardiyanti & Zulian, 2018)

Provinsi Sumatera Utara memerlukan kebijakan pengembangan sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki. Hal ini menjadi penting untuk memastikan pembangunan yang menjadi potensi atau yang diprioritaskan dapat dapat dijalankan sebagaimana konsep tahapan

(Rusyidi & Fedryansah, 2019). Salah satu prioritas nasional pengembangan pariwisata di Indonesia adalah Danau Toba yang masih belum menunjukkan kontribusi yang signifikan berdasarkan kunjungan wisata yang masih rendah atau berdasarkan lama kunjungan wisata yang belum mencapai target yang ditentukan.

Pengembangan suatu wilayah melalui kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi sosial yang dimiliki suatu wilayah sebagaimana pemanfaatan para ulama dalam melakukan penanganan menghadapi pandemic covid 19 di Indonesia.(Sugara & Ulfa, 2021) Hal ini menunjukkan pemanfaatan pengembangan suatu wilayah menjadi hal yang sejalan dengan konsep sinergitas antara pemerintah dengan pihak stakeholder. Ecara sistematis evaluasi kebijakan pengembangan yang dilakukan dengan konsep keberlanjutan antara lainL

1.Aspek Sosial Budaya

Aspek sosial masyarakat merupakan kekuatan-kekuatan sosial masyarakat atau modal sosial yang harus dimanfaatkan dalam mendukung pengembangan wilayah. Penguatan social yang dimaksud dapat dilakukan dengan memberikan dukungan bagi kearifan local yang ada di masyarakat pada suatu wilayah. Hal ini pada sebagian masyarakat masih berjalan, namun seiring perkembangan masyarakat yang terjadi secara global memerlukan kepedulian dari pihak pemerintah dan stakeholder dalam mendukung pelestarian nilai-nilai sosial yang luhur di masyarakat untuk dikembangkan.(Purwanto & Ritonga, 2017).

2.Aspek Politik

Secara politik kebijakan pengembangan wilayah di Sumatera Utara sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditandai oleh peningkatan kinerja kelembagaan yang terkait. Tantangan yang juga dilakukan dalam pengembangan wilayah dapat dilihat melalui pengembangan pariwisata Kaldera Danau Toba yang masih sangat tertinggal dengan prioritas wisata nasional lainnya yang dapat dilihat

berdasarkan masih rendahnya pelayanan public kepariwisataan dan masih rendahnya kinerja kelembagaan dalam pengembangan pariwisata Danau Toba yang sudah ditetapkan oleh Unesco menjadi Global Geopark. Berdasarkan penetapan yang dilakukan secara kelembagaan internasional juga menjadi tantangan yang berat bagi upaya peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah serta pihak stakeholder.(Nawi, 2019)

3.Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi dalam pengembangan wilayah dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dijalankan di Indonesia maupun di secara khusus di Provinsi Sumatera Utara. Implementasi dana desa yang dijalankan melalui kebijakan yang dijalankan secara nasional dapat dilihat melalui aspek perekonomian dari sisi pengelolaan anggaran yang dijalankan.(Hadi, 2019). Pengelolaan keuangan yang telah berjalan dari beberapa tahun terakhir telah menunjukkan tidak profesionalnya pengelolaan keuangan desa sehingga kurang memberikan peningkatan ekonomi yang menjadi tantangan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Aspek ekonomi di era globalisasi yang terjadi saat ini semakin menuntut adanya penguatan kesiapan Provinsi Sumatera Utara dalam persaingan ekonomi yang bersaing dengan dengan daerah lainnya sebagai bentuk daya saing daerah. (Sinaga, 2019). Aspek ekonomi memiliki dampak yang sangat luas dalam mengembangkan suatu wilayah yang dapat dilihat di Provinsi Sumatera Utara masih mengalami banyak masalah seperti: kemiskinan, tenaga kerja atau tingkat pengangguran yang masih tinggi.

4.Aspek Sumber Daya Manusia.

Kebijakan pengembangan wilayah yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankannya. Faktor utama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah program pendidikan dan pelatihan yang

dilakukan sesuai dengan tuntutan yang sejalan dengan pengembangan wilayah. Kawasan Danau Toba sebagai prioritas wisata nasional memerlukan dukungan dari masyarakat dan pelaku wisata dengan kemampuan dalam mengembangkan pariwisata. (D, 2020). Kebijakan pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan dengan berbagai ketrampilan yang dibutuhkan suatu wilayah sebagaimana konteks pengembangan pariwisata.

Aspek sumber daya manusia juga dapat dilakukan dalam konteks pemerintahan administrative suatu kecamatan yang dilakukan sejalan dengan tujuan pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintahan tertentu. Potensi suatu wilayah dapat diarahkan penggunaannya untuk mendukung produktivitas masyarakat sebagaimana yang dilakukan masyarakat di Jaharun B Kecamatan Galang yang dilakukan kelompok masyarakat dalam mengembangkan tanaman obat guna mendukung kesehatan dan juga perekonomian masyarakat. (Ayu Sartika Pane, Kariaman Sinaga, 2022). Berbagai bentuk lainnya dapat dijadikan dasar atau model pengembangan kebijakn di Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan diberbagai level pemerintahan.

e. Aspek Hukum

Penegakan hukum merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan dalam kebijakan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Tanpa dukungan dari penegakan hukum dalam pelaksanaan kebijakn pengembangan wilayah tidak akan mencapai keberhasilan. Namun dari sisi yang lain penegakan hokum yang dilakukan harus dimulai dari pihak pemerintah dalam memberikan keteladanan sehingga pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan dapat memberikan dukungan yang kuat karena telah ddasari oleh kepercayaan dari masyarakat dan pihak-pihak swasta atau perusahaan.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana dapat dilihat dari berbagai bidang yang diprioritaskan maupun sektor yang diprioritaskan dapat dilihat melalui tahapan-tahapan kebijakan publik yang memerlukan penegakan hukum yang dilakukan

melalui pihak lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (Hastuti & Soehartono, 2018). Hal ini dapat dilihat melalui tahapan kebijakan yang didukung oleh penegakan hukum untuk mengawal kebijakan pengembangan yang dijalankan. Termasuk dalam melihat tahapan kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan pendekatan aspek sosial, aspek ekonomi, aspek sumber daya manusia maupun aspek politik dalam mendukung kebijakan pengembangan wilayah.

Persoalan sosial budaya masih menjadi hambatan dalam mendukung kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini termasuk masalah mental masyarakat yang dapat dilihat melalui berbagai kelompok atau komunitas yang ada di masyarakat. Untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang dimaksud maka diperlukan aspek hukum yang akan memberikan penegasan atau memaksa bagi pihak-pihak terkait dalam proses kebijakan pengembangan wilayah. Proses kebijakan pengembangan wilayah yang dilakukan masing-masing wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki perbedaan secara geografis turut memberikan perbedaan dalam pengembangan wilayah termasuk salah satunya dalam pengembangan potensi pariwisata. Potensi pariwisata yang sangat besar menjadi tidak maksimal dikarenakan kurangnya perhatian dalam melakukan kebijakan pengembangan yang turut berdampak pada keberlanjutan dari aspek sosial dan aspek ekonomi. (Hendrita, 2017)

Pembangunan berkelanjutan dalam konsep sinergitas antara pemerintah dengan pihak stakeholder lainnya menentukan keberhasilan kebijakan pengembangan wilayah melalui peran pemerintah dalam mendukung atau memfasilitasi kekuatan social yang ada di masyarakat. Hal ini sebagaimana konsep “good governance” yang mengharuskan keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang kuat dalam mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki berbagai dampak pembangunan yang selalu mengalami perubahan kearah yang lebih baik (dynamic engagement). (Sari, 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara masih belum berjalan maksimal dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan karena menghadapi tantangan dari berbagai aspek meliputi: aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, aspek sumber daya manusia, dan aspek hukum. Apabila kebijakan pengembangan wilayah yang dilakukan tanpa memperhatikan pembangunan berkelanjutan akan memberikan pembangunan yang bersifat semu yang dapat dilihat berdasarkan pada berbagai persoalan yang utamanya adalah kurangnya keadilan bagi masyarakat berdasarkan aspek-aspek kehidupan masyarakat.

Keberhasilan dalam proses kebijakan pengembangan wilayah yang dilakukan dengan konsep pembangunan berkelanjutan akan memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga kebijakan pengembangan wilayah yang dilakukan tidak bersifat semu tetapi memberikan dampak pemerataan bagi kehidupan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Konsep wilayah yang dimaksud dapat dilakukan berdasarkan kriteria wilayah administrative kabupaten, kota, provinsi serta dilihat melalui wilayah regional tertentu sehingga dalam proses pengembangannya dapat dilakukan melalui level wilayah di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mendukung keberhasilan dalam kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara diperlukan sinkronisasi dengan aspek-aspek yang menyentuh kehidupan masyarakat melalui keterlibatan berbagai kelompok, komunitas, atau lembaga masyarakat sehingga kebijakan pengembangan yang dilakukan dapat meningkatkan daya saing daerah dan menghasilkan pembangunan yang merata sesuai dengan potensi wilayah di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, D., & Zulian, I. (2018). KORELASI IDENTIFIKASI APATISME POLITIK DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK KOTA MEDAN. *Jurnal PIR : Power in International Relations*, 3(1). <https://doi.org/10.22303/pir.3.1.2018.29-53>
- Ayu Sartika Pane, Kariaman Sinaga, Y. S. (2022). MENSTIMULASI SEMANGAT BERWIRAUSAHA DENGAN MEMANFAATKAN TOGA BAGI ANGGOTA PKK DESA JAHARUN B KECAMATAN GALANG. *Reswara Jurnal Pengabdian Masyarakat Undhar*, 3 No.2(Pemberdayaan Masyarakat), 364–369.
- D, H. (2020). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1). <https://doi.org/10.37755/jsap.v9i1.250>
- Hadi, R. R. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Hariyanto, & Tukidi. (2007). Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Geografi-FIS Unnes*, 4(1).
- Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Jurisprudence*, 8(1). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293>
- Hendrita, V. (2017). KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN TANAH DATAR. *Agrifo : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 2(2). <https://doi.org/10.29103/ag.v2i2.379>
- Nawi, R. (2019). Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Kualitas Pelayanan, penguatan Kelembagaan dan Kinerja Organisasi Pemerintahan. *PLENO JURE*, 4(5). <https://doi.org/10.37541/plenojure.v4i5.25>
- Purwanto, E., & Ritonga, K. (2017). Pengaruh Evaluasi Kebijakan Publik, Biaya Sambung Pada Minat Masyarakat Dalam Pemanfaatan Air Bersih. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(3).
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2019). PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20490>
- Sari, Y. K. (2019). Pendampingan Berkelanjutan terhadap Pengembangan Pariwisata Desa Selopamiro. *Bakti Budaya*, 2(1). <https://doi.org/10.22146/bb.45040>

- Sinaga, K. (2019). *SINKRONISASI GOOD GOVERNANCE DALAM KONSEP KEWARGANEGARAAN INDONESIA*. Digital Repository Unimed.
- Sugara, R., & Ulfa, M. (2021). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Covid-19 melalui Pendekatan Keagamaan. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1).
<https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.361>
- Yulyana, N. L. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3.

